

Peacebuilding Multidimensional Pascakonflik Keagamaan Di Indonesia: Integrasi Peran Generasi Muda Inovasi Sosial Dan Rekonsiliasi Sosial

Cindy Aulia Krisna, Ahmad Jaiz

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email Correspondent: Cindyauliya0406@gmail.com, ahjaiza@gmail.com

Received: 03-11-2025

Revised: 06-12-2025

Accepted: 31-12-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *rejection of places of worship, conflict resolution, interfaith harmony, mediation.*

This article examines sustainable peacebuilding after religious conflict in Indonesia, emphasizing the importance of integrating the roles of youth, social innovation, and social reconciliation within a multidimensional peacebuilding framework. The background of this research stems from the reality that various religious conflicts in Indonesia have generally been successfully mitigated through political and security approaches. However, these efforts have not fully addressed the root of the social problems, leaving residues in the form of social segregation, intergroup distrust, and the development of narratives of intolerance at the grassroots level. This research aims to conceptually analyze how structural, relational, and cultural approaches to peacebuilding can be effectively operationalized through youth engagement and community-based social innovation. This article uses a qualitative approach with a critical literature review method of relevant academic sources, policy documents, and research reports. The analysis is enriched with illustrative case studies from the regions of Ternate, Aceh Singkil, and Tolikara that represent the dynamics of post-religious conflict in Indonesia. The analysis shows that youth have a strategic role as agents of social transformation, particularly in facilitating interfaith dialogue, producing peace narratives in public and digital spaces, and strengthening community social capital. Community-based social innovation has proven effective in bridging the limitations of formal state structures while simultaneously strengthening the relational and cultural dimensions of peacebuilding. This article concludes that sustainable peace after religious conflict can only be achieved through the simultaneous integration of inclusive structural policies, participatory social reconciliation, and cultural value transformation that actively and sustainably involves the younger generation.

Abstrak

Artikel ini mengkaji pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia dengan menekankan pentingnya integrasi peran generasi muda, inovasi sosial, dan rekonsiliasi sosial dalam kerangka peacebuilding yang bersifat multidimensional. Latar belakang penelitian ini

berangkat dari realitas bahwa berbagai konflik keagamaan di Indonesia secara umum telah berhasil diredam melalui pendekatan politik dan keamanan. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial, sehingga masih menyisakan residu berupa segregasi sosial, ketidakpercayaan antar kelompok, serta berkembangnya narasi intoleransi di tingkat masyarakat akar rumput. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual bagaimana pendekatan struktural, relasional, dan kultural dalam peacebuilding dapat dioperasionalkan secara efektif melalui keterlibatan generasi muda dan inovasi sosial berbasis komunitas. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur kritis terhadap sumber-sumber akademik, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian yang relevan. Analisis tersebut diperkaya dengan studi kasus ilustratif dari wilayah Ternate, Aceh Singkil, dan Tolikara yang merepresentasikan dinamika pascakonflik keagamaan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen transformasi sosial, khususnya dalam memfasilitasi dialog lintas iman, memproduksi narasi perdamaian di ruang publik dan digital, serta memperkuat modal sosial komunitas. Inovasi sosial berbasis partisipasi masyarakat terbukti mampu menjembatani keterbatasan struktur formal negara, sekaligus memperkuat dimensi relasional dan kultural dalam pembangunan perdamaian. Artikel ini menyimpulkan bahwa perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan hanya dapat terwujud melalui integrasi simultan antara kebijakan struktural yang inklusif, rekonsiliasi sosial yang partisipatif, dan transformasi nilai kultural yang melibatkan generasi muda secara aktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Peacebuilding, konflik keagamaan, generasi muda, inovasi sosial, rekonsiliasi sosial

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga fondasi sosial yang membentuk dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian tentang pendidikan dan kewargaan menunjukkan bahwa pluralitas agama dan budaya di Indonesia menjadi basis penting pembentukan praktik kewargaan inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pluralitas juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami sejumlah konflik sosial berlatar belakang keagamaan yang berdampak signifikan terhadap kohesi sosial, seperti konflik Ambon, Poso, serta konflik berskala lokal di Aceh Singkil dan Tolikara pada tahun 2015. Konflik-konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban fisik dan kerusakan material, tetapi juga meninggalkan trauma kolektif serta luka sosial yang berkepanjangan.¹

Berbagai upaya resolusi konflik memang telah berhasil meredakan kekerasan terbuka dan memulihkan stabilitas politik, namun kondisi pascakonflik menunjukkan bahwa tantangan sosial belum sepenuhnya teratasi. Residu konflik masih termanifestasi dalam bentuk ketidakpercayaan antar kelompok keagamaan, segregasi sosial dan spasial, serta berkembangnya narasi intoleransi di ruang publik, terutama melalui media digital. Ansori et al. Menemukan bahwa konflik Ambon menghasilkan segregasi spasial dan sosial yang tajam antara komunitas Muslim dan Kristen, yang terus memengaruhi pola interaksi masyarakat jauh setelah kekerasan terbuka mereda. Situasi ini menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai ketiadaan kekerasan fisik, melainkan sebagai proses sosial jangka panjang yang menuntut rekonstruksi hubungan

¹ Moh Muhtador, "Teologi Persuasif Ayat-Ayat Makkiyah; Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama," *Fikrah* 4, no. 2 (2016): 188–99, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1513>.

antarindividu dan antarkelompok secara menyeluruh melalui pendekatan yang bersifat struktural, relasional, dan kultural.²

Aspek struktural berkaitan dengan keadilan sosial, kebijakan publik yang inklusif, serta akses setara terhadap sumber daya; aspek relasional menekankan pemulihan kepercayaan melalui dialog dan interaksi sosial yang setara; sementara aspek kultural berfokus pada internalisasi nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penguatan identitas kebangsaan yang inklusif. Apandie & Rahmelia menegaskan ulang pandangan Lederach bahwa peacebuilding menuntut kerja simultan pada ketiga ranah tersebut melalui rekonstruksi institusi, pemulihan kepercayaan, dan transformasi imajinasi kolektif tentang pihak 'lain'.³ Dalam kerangka pembangunan perdamaian berkelanjutan tersebut, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai aktor sosial yang tidak hanya mewarisi dampak konflik masa lalu, tetapi juga berperan penting dalam membentuk arah relasi sosial di masa depan. Karakteristik generasi muda yang adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap perbedaan, serta memiliki literasi teknologi yang tinggi menjadikan mereka aktor potensial dalam mendorong rekonsiliasi sosial. Studi tentang interfaith dialogue, collective trauma healing, and youth menunjukkan bahwa pemuda tidak semata diposisikan sebagai korban atau pelaku potensial radikalisme, melainkan sebagai pelaku kunci yang memfasilitasi dialog, mengartikulasikan trauma kolektif, serta membangun narasi ko-eksistensi baru.⁴

Namun demikian, kajian mengenai perdamaian pascakonflik keagamaan di Indonesia masih cenderung berfokus pada peran negara, elite politik, dan mekanisme formal resolusi konflik, sementara peran generasi muda sering kali diposisikan secara normatif sebagai “agen perubahan” tanpa analisis mendalam terhadap praktik sosial konkret di tingkat komunitas. Di sisi lain, inovasi sosial sebagai pendekatan berbasis partisipasi masyarakat umumnya dibahas secara terpisah dari isu konflik keagamaan, sehingga keterkaitan antara inovasi sosial, generasi muda, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan belum banyak dikaji secara terpadu dalam konteks Indonesia pascakonflik. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran generasi muda dan inovasi sosial dalam membangun perdamaian berkelanjutan pasca konflik keagamaan di Indonesia, dengan menempatkan generasi muda sebagai aktor sosial dan inovasi sosial sebagai strategi transformasi yang berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan pengelolaan keberagaman secara lebih partisipatif dan kontekstual.⁵

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur kritis (*critical literature review*).⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam. Metode kajian literatur kritis digunakan untuk mensintesis dan menganalisis temuan-temuan konseptual dari berbagai sumber akademik secara sistematis dan reflektif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur hubungan kausal

² Maslan Abdin, “Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural,” *Jurnal Pattimura Civic* 1, no. 1 (2020): 1–9, <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc>.

³ Ansori, M. H., Sukandar, R., Peranto, S., Karib, F., Cholid, S., & Rasyid, I. (2014). Kebijakan rekonstruksi pasca konflik di Ambon.

⁴ Ahmad Khozin, “Kepemimpinan Pendidikan Islam Multikultural,” *Jurnal Ilmiah Iqra'* 13, no. 2 (2019): 70–80, <https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.971>.

⁵ Baidhawiyah, Z. (2015). Islam dan multikulturalisme Indonesia. Mizan Publika.

⁶ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, “Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi,” *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam konsep, pendekatan, dan praktik pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia, khususnya yang melibatkan peran generasi muda dan inovasi sosial berbasis komunitas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur akademik berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta laporan kebijakan dan dokumen institusional yang relevan dengan tema konflik keagamaan, peacebuilding, perdamaian berkelanjutan, inovasi sosial, dan keterlibatan pemuda. Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi substansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan konteks masyarakat pascakonflik di Indonesia. Untuk menjaga aktualitas analisis, sebagian besar sumber yang digunakan diterbitkan dalam rentang waktu 2010–2024, meskipun beberapa karya klasik yang bersifat konseptual tetap digunakan sebagai landasan teoretis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik dan sumber daring yang kredibel dengan menggunakan kata kunci seperti *sustainable peace*, *peacebuilding*, *religious conflict*, *youth participation*, dan *social innovation*. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan dimensi struktural, relasional, dan kultural perdamaian.⁷

Teknik analisis data dilakukan secara tematik dan deskriptif-analitis. Literatur yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan mengidentifikasi pola, argumen utama, serta temuan-temuan yang relevan dengan kerangka teoretis penelitian. Analisis diarahkan untuk menelaah bagaimana konsep perdamaian berkelanjutan dan peacebuilding dioperasionalkan dalam konteks Indonesia, serta bagaimana peran generasi muda dan inovasi sosial berkontribusi pada proses rekonsiliasi pascakonflik keagamaan. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan studi kasus ilustratif untuk memperkuat analisis konseptual. Kasus-kasus di Ternate (Maluku Utara), Aceh Singkil, dan Tolikara Papua dipilih karena merepresentasikan dinamika konflik keagamaan dan upaya rekonsiliasi yang melibatkan aktor lokal, khususnya pemuda dan komunitas lintas iman. Studi kasus tersebut tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris, melainkan sebagai ilustrasi kontekstual untuk menunjukkan bagaimana kerangka teoretis perdamaian berkelanjutan bekerja dalam praktik sosial. Dengan pendekatan metodologis ini, artikel diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif dan kontekstual mengenai pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian peacebuilding berbasis pemuda dan inovasi sosial.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep perdamaian berkelanjutan (*sustainable peace*) yang dikembangkan dalam studi perdamaian dan resolusi konflik, khususnya melalui pemikiran Johan Galtung dan John Paul Lederach. membedakan perdamaian ke dalam dua bentuk, yaitu *negative peace*, yang merujuk pada berhentinya kekerasan langsung, dan *positive peace*, yang menekankan hilangnya kekerasan struktural dan kultural melalui keadilan sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup dipahami sebagai ketiadaan konflik terbuka, melainkan sebagai kondisi sosial yang memungkinkan setiap kelompok hidup secara setara dan bermartabat. Sejalan dengan pandangan tersebut, memperkenalkan konsep peacebuilding

⁷ Erna Kurniawati, "Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Persektif Al-Qur'an," *Al-MUNZIR* 12, no. 2 (2020): 225, <https://doi.org/10.31332/am.v12i2.1545>.

⁸ Ais Mariya Ulva et al., "Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 459–74.

sebagai proses jangka panjang yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial, rekonstruksi institusi, dan transformasi nilai dalam masyarakat pascakonflik.⁹ Peacebuilding dipahami bukan sebagai intervensi sesaat, melainkan sebagai upaya simultan yang bekerja pada berbagai lapisan sosial untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, perdamaian dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan perubahan struktur, relasi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, perdamaian berkelanjutan dalam artikel ini dipahami sebagai kondisi yang dibangun melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu struktural, relasional, dan kultural. Dimensi struktural mencakup aspek kebijakan publik, sistem hukum, dan distribusi sumber daya yang adil, yang menentukan sejauh mana negara dan institusi mampu menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga. Dimensi relasional menitikberatkan pada pemulihan kepercayaan, dialog, dan rekonsiliasi antar kelompok sosial dan keagamaan yang sebelumnya terlibat konflik. Sementara itu, dimensi kultural berfokus pada transformasi nilai, norma, dan persepsi terhadap “yang lain”, khususnya melalui pendidikan, praktik budaya, dan pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif.¹⁰

Dalam konteks masyarakat pascakonflik, ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan struktural tanpa pemulihan relasi sosial berpotensi melahirkan perdamaian yang rapuh, sementara rekonsiliasi sosial tanpa transformasi nilai kultural berisiko mengulang pola konflik lama. Apandie dan Rahmelia¹¹ menegaskan ulang pemikiran Lederach bahwa peacebuilding menuntut kerja simultan pada level struktur, relasi, dan budaya, yang mencakup rekonstruksi institusi, pemulihan kepercayaan sosial, serta transformasi imajinasi kolektif tentang pihak “lain”. Selain itu, artikel ini juga memanfaatkan konsep inovasi sosial untuk menjelaskan bagaimana aktor non-negara berkontribusi dalam proses peacebuilding. Mulgan¹² mendefinisikan inovasi sosial sebagai munculnya cara-cara baru yang diciptakan masyarakat untuk merespons permasalahan sosial yang kompleks. Dalam konteks pascakonflik keagamaan, inovasi sosial dapat berwujud komunitas lintas iman, pendidikan partisipatif, pemanfaatan media digital, serta inisiatif ekonomi kolaboratif yang memperkuat modal sosial masyarakat.¹³

Inovasi sosial menjadi penting karena lahir dari kebutuhan lokal dan memungkinkan masyarakat membangun mekanisme perdamaian yang kontekstual dan berkelanjutan. Kerangka teoretis ini juga menempatkan generasi muda sebagai aktor strategis dalam peacebuilding. Pemuda dipahami sebagai agen transformasi sosial yang memiliki kapasitas adaptif, kreativitas, dan akses luas terhadap teknologi digital. Melalui keterlibatan dalam ruang dialog lintas iman, produksi narasi perdamaian di media sosial, serta praktik pendidikan perdamaian, generasi muda berkontribusi pada penguatan dimensi relasional dan kultural perdamaian. Pendidikan perdamaian, baik melalui institusi formal maupun inisiatif komunitas, berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis, empati, dan sikap inklusif di kalangan generasi muda. Dengan demikian, kerangka teoretis dalam

⁹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

¹⁰ Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. PRIO.

¹¹ Apandie, C., & Rahmelia, S. (2024). Impact of peace values on the religious behavior of young citizens at public religious universities. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 6(1). <https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS>

¹² Jati, W., Syamsurijal, S., & Halimatusa'diah, H. (2024). Reevaluating approaches to religious moderation at the grassroots level: The role of Muslim youth in advancing interfaith dialogue. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 85–108. <https://www.aljamiah.or.id/ajis/article/view/62107>

¹³ Suci Prasasti, “Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya,” *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)* 1, no. 1 (2017): 28–45.

artikel ini memadukan konsep perdamaian berkelanjutan, peacebuilding, inovasi sosial, dan peran generasi muda sebagai satu kesatuan analitis. Kerangka ini digunakan untuk membaca dinamika pembangunan perdamaian pascakonflik keagamaan di Indonesia, khususnya dalam menelaah bagaimana inisiatif berbasis komunitas dan pemuda berkontribusi pada transformasi struktural, relasional, dan kultural secara berkelanjutan.¹⁴

Analisis kasus dalam artikel ini digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kerangka perdamaian berkelanjutan dan peacebuilding bekerja dalam konteks nyata masyarakat pascakonflik keagamaan di Indonesia. Kasus Ternate, Aceh Singkil, dan Tolikara dipilih karena menunjukkan variasi pendekatan rekonsiliasi yang melibatkan aktor lokal, khususnya generasi muda, inovasi sosial, dan mekanisme budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai proses yang linier atau tunggal, melainkan merupakan interaksi dinamis antara berbagai dimensi struktural, relasional, dan kultural yang saling berkelindan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga dimensi tersebut bekerja secara simultan dan saling melengkapi, sehingga perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan kekerasan, melainkan sebagai upaya rekonstruksi sosial yang melibatkan transformasi nilai, pemulihan hubungan sosial, dan penguatan kelembagaan yang adil serta inklusif. Dalam konteks masyarakat pascakonflik seperti di Ternate, Aceh Singkil, dan Tolikara, perdamaian berkelanjutan menunjukkan bentuk-bentuk implementasi yang beragam namun memiliki benang merah yang sama, yaitu partisipasi aktif masyarakat lokal dan peran strategis generasi muda sebagai penggerak utama proses rekonsiliasi.¹⁵

Di Ternate, misalnya, pasca-konflik sosial pada awal 2000-an, masyarakat berupaya membangun kembali jalinan kepercayaan antar kelompok melalui kegiatan budaya lintas agama seperti *Festival Tidore Peace Culture* dan dialog pemuda lintas iman. Aktivitas semacam ini menjadi arena perjumpaan sosial yang melampaui batas-batas sektarian, membangun komunikasi yang setara, serta menumbuhkan kembali rasa kebersamaan yang sempat terputus akibat konflik. Melalui kegiatan budaya yang terus dipelihara, masyarakat tidak hanya memperkuat relasi sosial (dimensi relasional), tetapi juga mentransformasi cara pandang terhadap identitas keagamaan menjadi identitas kebersamaan yang lebih luas sebagai warga Maluku Utara (dimensi kultural). Inisiatif lokal seperti ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan perdamaian dapat terwujud meskipun tanpa intervensi negara yang besar, selama ada dukungan sosial dan kesadaran kolektif di tingkat komunitas.¹⁶

Sementara itu, kasus Aceh Singkil menggambarkan pentingnya inovasi sosial dan pendidikan perdamaian dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat pascakonflik. Konflik rumah ibadah yang terjadi pada tahun 2015 bukan hanya berakar pada perbedaan agama, melainkan juga pada lemahnya pemahaman terhadap regulasi hukum, kurangnya ruang komunikasi, dan terbatasnya akses terhadap informasi yang adil. Dalam situasi seperti ini, muncul inisiatif masyarakat berupa Sekolah Perdamaian Singkil yang diinisiasi oleh jaringan pemuda lintas agama

¹⁴ Kusmayani, A. E. P. (2023). Youth interfaith dialogue in everyday citizenship in Indonesia: Bridging religious diversity and citizenship challenges. *Focus*, 4(2), 159–168. <https://doi.org/10.26593/focus.v4i2.7375>

¹⁵ Mohammad Fuad Al Amin Rosyidi, “Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Madaniyah* 9, no. 2 (2019): 277–96, <https://nasional.tempo.co/read/898613/konflik-atasnama-agama-berpotensi-terjadi-di->

¹⁶ Mutia Asmikhazali, “AGAMA DAN PERDAMAIAN: Studi Perbandingan Dialog Antar Iman Menurut Pemikiran Mohammed Abu-Nimer Dan Pemikiran Dialog Antar Iman Di Indonesia Disusun” (Uin Syarif Hidayatullah, 2021).

dengan dukungan lembaga pendidikan dan organisasi sipil. Program ini berorientasi pada penguatan literasi perdamaian, komunikasi non-kekerasan, serta pendidikan hak-hak kewargaan. Melalui kegiatan belajar bersama, diskusi, dan proyek kolaboratif, para pemuda Muslim dan Kristen tidak hanya saling memahami, tetapi juga bersama-sama membangun kesadaran kritis tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai. Inisiatif semacam ini menggambarkan bagaimana inovasi sosial mampu menutupi kelemahan dimensi struktural, karena tumbuh dari kebutuhan dan kreativitas masyarakat itu sendiri.¹⁷

Sekolah Perdamaian Singkil menjadi bukti nyata bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai agen transformasi sosial, yang secara langsung berkontribusi pada rekonsiliasi relasional dan pembentukan nilai-nilai toleransi yang lebih dalam.¹⁸ Kasus Tolikara di Papua menghadirkan konteks berbeda, namun esensinya tetap menunjukkan keterkaitan antara struktur, budaya, dan generasi muda dalam membangun perdamaian. Konflik antara komunitas gereja dan umat Muslim pada tahun 2015 diselesaikan melalui pendekatan yang mengintegrasikan dimensi struktural, relasional, dan kultural sekaligus.¹⁹ Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Tolikara (FKUBT) menjadi bentuk intervensi struktural yang penting, karena menciptakan wadah resmi untuk mediasi dan komunikasi antaragama. Namun, di luar itu, masyarakat juga menggunakan kearifan lokal seperti tradisi barapen bersama atau makan bersama sebagai simbol rekonsiliasi dan penerimaan kembali. Tradisi ini berfungsi sebagai bahasa budaya perdamaian yang kuat, mencairkan ketegangan emosional sekaligus memulihkan kepercayaan sosial. Dalam seluruh proses ini, keterlibatan pemuda sangat signifikan mereka menjadi fasilitator kegiatan sosial, mediator komunikasi, dan jembatan antara kelompok yang sebelumnya terpisah. Peran aktif pemuda di Tolikara menunjukkan bagaimana energi sosial mereka dapat menghidupkan kembali rasa solidaritas dan memperkuat pondasi kultural perdamaian.²⁰

Ketiga kasus tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa keberhasilan peacebuilding di Indonesia tidak semata ditentukan oleh kekuatan institusi formal, melainkan oleh kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, berinovasi, dan memelihara nilai-nilai sosial yang inklusif. Proses perdamaian yang lahir dari bawah (bottom-up) terbukti lebih tahan lama karena berakar pada pengalaman bersama dan kesadaran lokal. Generasi muda menjadi aktor kunci dalam dinamika ini, bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai pencipta ruang sosial baru yang mendorong kolaborasi lintas identitas. Mereka memanfaatkan media digital, seni, dan pendidikan sebagai sarana untuk memproduksi narasi perdamaian dan melawan wacana intoleransi. Dengan demikian, peacebuilding multidimensional menuntut kehadiran pemuda bukan sebagai simbol semata, tetapi sebagai subjek aktif yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan nyata di masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama yang masih menghambat keberlanjutan perdamaian di tingkat lokal. Di antaranya adalah ketergantungan

¹⁷ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 134–47, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.

¹⁸ Roni Ismail, "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2458>.

¹⁹ Cut Lusi Chairun Nisak and Tuthi' Mazidar Rohmah, "Dinamika Konflik Antar Wahabi Dan Aswaja Di Aceh," *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i1.2774>.

²⁰ Dewi Ariyanti Soffi, "Dialog Lintas Iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kehidupan Toleransi Umat Beragama," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 7, no. 2 (2023): 176–92.

pada dukungan donor jangka pendek, keterbatasan dukungan kebijakan pemerintah terhadap inisiatif komunitas, serta risiko politisasi identitas agama yang dapat mengancam kohesi sosial yang telah terbentuk.²¹

Oleh karena itu, pembangunan perdamaian berkelanjutan menuntut integrasi yang lebih erat antara kebijakan struktural yang adil, partisipasi masyarakat sipil, dan kreativitas pemuda. Sinergi di antara ketiga elemen ini menjadi syarat penting untuk mewujudkan perdamaian positif sebagaimana dikemukakan oleh Johan Galtung perdamaian yang tidak hanya meniadakan kekerasan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.²² Dalam kerangka tersebut, pemikiran John Paul Lederach tentang peacebuilding berlapis juga menemukan relevansinya, karena menunjukkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai melalui kerja simultan antara struktur formal, relasi sosial, dan budaya yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pengalaman Ternate, Aceh Singkil, dan Tolikara memberikan pelajaran berharga bahwa perdamaian yang lahir dari partisipasi dan kesadaran komunitas memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan rekonsiliasi yang bersifat administratif. Integrasi peran generasi muda, inovasi sosial, dan transformasi nilai kultural menjadi kunci utama dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan di masyarakat multikultural Indonesia. Ketika kebijakan negara, kekuatan sosial, dan nilai budaya berjalan seiring, maka perdamaian tidak lagi hanya menjadi wacana, melainkan kenyataan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.²³

B. Pascakonflik Keagamaan Di Indonesia

Pascakonflik keagamaan di Indonesia merupakan fase penting dalam perjalanan sosial bangsa yang menuntut perhatian serius terhadap upaya pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali kohesi sosial. Indonesia sebagai negara multikultural dengan keragaman agama, etnis, dan budaya memiliki sejarah konflik keagamaan di beberapa daerah, seperti Ambon, Poso, dan wilayah lainnya, yang meninggalkan dampak mendalam tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis, keretakan hubungan sosial, serta hilangnya rasa saling percaya antarwarga. Pada fase pascakonflik, tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah membangun kembali hubungan antarumat beragama yang sempat terpecah akibat kekerasan dan provokasi. Proses ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.²⁴ Rekonsiliasi sosial menjadi agenda utama, yang diwujudkan melalui dialog lintas agama, penguatan nilai toleransi, serta pengakuan atas penderitaan semua pihak tanpa membedakan latar belakang agama.²⁵

Upaya ini penting untuk menumbuhkan kembali rasa keadilan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Selain rekonsiliasi sosial, pemulihan pascakonflik juga mencakup rehabilitasi ekonomi

²¹ Muhammad Anang Firdaus, "EKSTENSIF FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014): 63–84.

²² Agung Santoso, "NILAI-NILAI PLURALISME DALAM Q.S AL- KAHFI AYAT 29 DAN IMPLIKASI NYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Kajian Tafsir Al - Misbah)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

²³ Kusmayani, A. E. P., Huda, M., & Muger, D. (2025). Interfaith dialogue, collective trauma healing, and youth peacebuilding in the Global South: A comparative study of trustbuilding programs in Indonesia and Kenya. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 4(2), 149–168. <https://doi.org/10.59029/int.v4i2.62>

²⁴ Abdul Halim, "POLA KONFLIK AGAMA DI WILAYAH PLURAL: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA JAMBI Zaki Mubarak," *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 19, no. 1 (2020): 85–109.

²⁵ Maulida Ulfa, "Maintaining Religious Moderation in the Digital Age: Challenges and Strategies for Facing Technology," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3, no. 1 (2024): 43–63, <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>.

dan pembangunan infrastruktur yang rusak. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak tertangani berpotensi memicu konflik ulang jika tidak diselesaikan secara adil. Oleh karena itu, keterlibatan negara sangat dibutuhkan dalam menjamin distribusi keadilan, perlindungan hak-hak warga, serta penegakan hukum yang berimbang.²⁶ Peran tokoh agama, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil sangat krusial dalam fase pascakonflik keagamaan. Mereka berfungsi sebagai mediator, penjaga nilai moral, sekaligus agen perdamaian yang mampu menjembatani perbedaan dan meredakan potensi konflik baru. Dengan demikian, fase pascakonflik keagamaan di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya menyembuhkan luka sosial dan trauma kolektif akibat kekerasan di masa lalu. Lebih dari itu, pascakonflik merupakan momentum strategis untuk melakukan refleksi bersama dan membangun kembali tatanan kehidupan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Proses penyembuhan tidak hanya menasar korban secara individual, tetapi juga menyentuh struktur sosial yang sempat retak akibat prasangka, ketidakpercayaan, dan segregasi berbasis identitas keagamaan.²⁷

Dalam konteks ini, pembangunan inklusivitas menjadi agenda utama, yakni dengan memastikan bahwa setiap kelompok agama memperoleh ruang yang setara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang tidak diskriminatif, penegakan hukum yang berimbang, serta distribusi sumber daya yang adil agar tidak melahirkan kecemburuan sosial yang berpotensi memicu konflik baru.²⁸ Upaya ini menuntut kehadiran negara yang aktif sekaligus sensitif terhadap keragaman lokal. Selain itu, pascakonflik keagamaan juga membuka ruang untuk memperkuat komitmen kebangsaan melalui penghayatan nilai-nilai persatuan. Dialog lintas agama, pendidikan toleransi, dan kerja sama sosial antarumat beragama menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kembali rasa saling percaya dan solidaritas. Tokoh agama, pendidik, dan masyarakat sipil berperan strategis dalam menanamkan narasi damai yang menegaskan bahwa perbedaan agama bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan sosial bangsa. Dengan berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika, pascakonflik keagamaan di Indonesia dapat menjadi titik balik untuk membangun masyarakat yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Momentum ini menegaskan bahwa persatuan tidak lahir dari penyeragaman, melainkan dari kesediaan untuk hidup berdampingan secara adil, bermartabat, dan saling menghormati.²⁹

1. Ternate (Maluku Utara)

Pasca konflik sosial-keagamaan pada awal 2000-an, Ternate mengalami proses transformasi sosial yang relatif stabil melalui penguatan interaksi lintas komunitas. Berbagai inisiatif budaya dan ekonomi lintas agama, seperti Festival Tidore Peace Culture dan dialog lintas iman yang melibatkan pemuda, berkontribusi pada pemulihan relasi sosial antar kelompok yang sebelumnya terpolarisasi. Inisiatif tersebut memperkuat dimensi relasional perdamaian dengan menciptakan ruang pertemuan yang setara dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan budaya bersama juga berperan dalam dimensi kultural perdamaian dengan membangun identitas kolektif sebagai

²⁶ A. Juliansyah, E., & Rizal, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 10 (2016): 166–74, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4814/2560>.

²⁷ Fatmawati, "Transformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama," *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (2023): 77–90.

²⁸ Agus Triyono and Ahmad Joko Setyawan, "ACEH DAN KONFLIK AGAMA: KONSTRUKSI PADA HARIAN REPUBLIKA," *Jurnal Studi Islam* 03 (2021): 141–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14773>.

²⁹ Halim, "POLA KONFLIK AGAMA DI WILAYAH PLURAL: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA JAMBI Zaki Mubarak."

warga Maluku Utara, bukan semata-mata berdasarkan identitas keagamaan. Meskipun aspek struktural seperti kebijakan formal bukan menjadi fokus utama dalam kasus ini, penguatan relasi sosial dan transformasi nilai kultural terbukti berkontribusi pada stabilitas perdamaian jangka panjang di tingkat komunitas.³⁰

2. Aceh Singkil

Kasus konflik rumah ibadah di Aceh Singkil pada tahun 2015 mencerminkan lemahnya dimensi struktural perdamaian, khususnya terkait pemahaman hukum, regulasi pendirian rumah ibadah, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh perbedaan keagamaan, tetapi juga oleh ketimpangan akses terhadap informasi hukum dan minimnya ruang dialog antar kelompok. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, muncul inovasi sosial berbasis komunitas melalui Program Sekolah Perdamaian Singkil. Program ini melibatkan pemuda Muslim dan Kristen dalam kegiatan pembelajaran bersama yang menekankan pemahaman hak beragama, resolusi konflik tanpa kekerasan, dan komunikasi lintas iman. Inisiatif ini memperkuat dimensi relasional melalui dialog intensif, sekaligus mendorong transformasi kultural dengan menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai sejak dini. Kasus Aceh Singkil menunjukkan bahwa inovasi sosial yang digerakkan oleh generasi muda mampu menjembatani kelemahan struktur formal dengan membangun mekanisme perdamaian alternatif di tingkat lokal.³¹

3. Tolikara (Papua)

Konflik antara kelompok gereja dan umat Muslim di Tolikara pada tahun 2015 menjadi titik balik penting dalam relasi antaragama di wilayah tersebut. Proses rekonsiliasi pascakonflik dilakukan melalui kombinasi pendekatan adat, mediasi sosial, dan keterlibatan pemuda. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Tolikara (FKUBT) menjadi langkah struktural penting untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik secara institusional. Pendekatan budaya seperti praktik “barapen bersama” (makan bersama) berfungsi sebagai simbol rekonsiliasi sosial yang kuat dan berkontribusi pada dimensi kultural perdamaian. Sementara itu, keterlibatan pemuda dalam forum dialog dan kegiatan sosial lintas iman memperkuat dimensi relasional dengan membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Kasus Tolikara menunjukkan bahwa integrasi antara struktur formal, kearifan lokal, dan partisipasi generasi muda dapat mempercepat proses peacebuilding pascakonflik.³²

Temuan dari ketiga kasus menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia tidak berjalan secara linear, melainkan melalui interaksi kompleks antara dimensi struktural, relasional, dan kultural. Hal ini sejalan dengan pandangan Galtung mengenai pentingnya *positive peace* serta pendekatan peacebuilding Lederach yang menekankan kerja simultan pada berbagai lapisan sosial. Kasus Ternate menegaskan bahwa penguatan relasi sosial dan transformasi nilai kultural dapat menjadi fondasi perdamaian yang relatif stabil, bahkan ketika intervensi struktural negara tidak dominan. Sebaliknya, kasus Aceh Singkil menunjukkan bahwa lemahnya struktur formal dapat memicu konflik, namun dapat diimbangi melalui inovasi sosial berbasis komunitas dan pendidikan perdamaian yang digerakkan oleh generasi muda. Sementara itu, Tolikara memperlihatkan bagaimana kombinasi antara

³⁰ Rahmawati, N. (2021). Pendidikan perdamaian di sekolah multikultural. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 105–120.

³¹ Ubaidillah, A. (2018). Peran masyarakat sipil dalam resolusi konflik keagamaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 89–108.

³² Muhtador, “Teologi Persuasif Ayat-Ayat Makkiah; Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama.”

reformasi kelembagaan, pendekatan budaya lokal, dan partisipasi pemuda mampu mempercepat pemulihan relasi sosial pascakonflik.³³

Peran generasi muda muncul sebagai benang merah dalam ketiga kasus tersebut. Pemuda tidak hanya berfungsi sebagai penerima dampak konflik, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang aktif menciptakan ruang dialog, memproduksi narasi perdamaian, dan memperkuat modal sosial komunitas. Temuan ini memperluas pendekatan peacebuilding dengan menekankan pentingnya aktor non-negara dan inovasi sosial dalam konteks masyarakat multikultural pascakonflik. Namun demikian, efektivitas inisiatif perdamaian berbasis komunitas dan pemuda tetap menghadapi keterbatasan, terutama terkait keberlanjutan pendanaan, dukungan kebijakan, dan risiko politisasi identitas. Tanpa penguatan dimensi struktural melalui kebijakan nasional yang inklusif dan konsisten, upaya perdamaian di tingkat lokal berpotensi bersifat temporer. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan struktural, relasional, dan kultural menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia.³⁴

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan sangat ditentukan oleh keterpaduan peran antara negara, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam mendorong terjadinya transformasi sosial yang menyeluruh. Perdamaian pascakonflik tidak dapat dibangun secara parsial atau sesaat, melainkan memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan yang bekerja secara berkelanjutan dan saling melengkapi. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kerangka kebijakan yang adil, menjamin keamanan, serta menegakkan hukum secara konsisten sebagai fondasi stabilitas sosial. Di sisi lain, masyarakat sipil berperan penting dalam mengawal proses perdamaian melalui penguatan dialog lintas identitas, pemberdayaan komunitas, serta pembangunan kepercayaan sosial di tingkat akar rumput. Organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal menjadi aktor strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai perdamaian ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sementara itu, generasi muda menempati posisi sentral sebagai agen perubahan sosial. Dengan kreativitas, inovasi, dan semangat kolaborasi yang tinggi, generasi muda memiliki potensi besar untuk merawat perdamaian melalui pendekatan-pendekatan baru yang adaptif terhadap dinamika zaman. Transformasi sosial pascakonflik tidak cukup hanya diwujudkan melalui perjanjian damai atau penghentian kekerasan semata, tetapi harus diperkuat melalui pendidikan, pemanfaatan media, serta aktivitas komunitas yang menumbuhkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan. Ketika ruang digital, sekolah, dan lembaga sosial berfungsi sebagai arena pembelajaran bersama yang inklusif, maka proses internalisasi nilai perdamaian dapat berlangsung secara lebih mendalam. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai model perdamaian multikultural yang tangguh dan berkelanjutan di tengah keragaman sosial dan keagamaan.

Daftar Pustaka

³³ ANANG SUGENG CAHYONO, "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA," *E-Journal Marine Inside* 1, no. 2 (2022): 142, <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.

³⁴ Fakultas Hukum et al., "FENOMENA INTOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA PERAN SOSIAL MEDIA AKUN INSTAGRAM JARINGAN GUSDURIAN INDONESIA DALAM MENYAMPAIKAN PESAN TOLERANSI," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–10, <https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/41>.

- Abdin, Maslan. "Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Pattimura Civic* 1, no. 1 (2020): 1–9. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc>.
- Asmikhazali, Mutia. "AGAMA DAN PERDAMAIAN: Studi Perbandingan Dialog Antar Iman Menurut Pemikiran Mohammed Abu-Nimer Dan Pemikiran Dialog Antar Iman Di Indonesia Disusun." Uin Syarif Hidayatullah, 2021.
- CAHYONO, ANANG SUGENG. "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA." *E-Journal Marine Inside* 1, no. 2 (2022): 142. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.
- Chairun Nisak, Cut Lusi, and Tuthi' Mazidar Rohmah. "Dinamika Konflik Antar Wahabi Dan Aswaja Di Aceh." *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i1.2774>.
- Fatmawati. "Transformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (2023): 77–90.
- Firdaus, Muhammad Anang. "EKSTENSIF FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014): 63–84.
- Halim, Abdul. "POLA KONFLIK AGAMA DI WILAYAH PLURAL: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA JAMBI Zaki Mubarak." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 19, no. 1 (2020): 85–109.
- Hukum, Fakultas, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, and Universitas Terbuka. "FENOMENA INTOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA PERAN SOSIAL MEDIA AKUN INSTAGRAM JARINGAN GUSDURIAN INDONESIA DALAM MENYAMPAIKAN PESAN TOLERANSI." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–10. <https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/41>.
- Ismail, Roni. "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2458>.
- Juliansyah, E., & Rizal, A. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 10 (2016): 166–74. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4814/2560>.
- Khozin, Ahmad. "Kepemimpinan Pendidikan Islam Multikultural." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 13, no. 2 (2019): 70–80. <https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.971>.
- Kurniawati, Erna. "Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Persektif Al-Qur'an." *Al-MUNZIR* 12, no. 2 (2020): 225. <https://doi.org/10.31332/am.v12i2.1545>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Muhtador, Moh. "Teologi Persuasif Ayat-Ayat Makkiyah; Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama." *Fikrah* 4, no. 2 (2016): 188–99. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1513>.
- Prasasti, Suci. "Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya." *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)* 1, no. 1 (2017): 28–45.
- Rosyidi, Mohammad Fuad Al Amin. "Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat Indonesia." *Jurnal Madaniyah* 9, no. 2 (2019): 277–96. <https://nasional.tempo.co/read/898613/konflik-atasnama-agama-berpotensi-terjadi-di->
- Santoso, Agung. "NILAI-NILAI PLURALISME DALAM Q.S AL- KAHFI AYAT 29 DAN IMPLIKASI NYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Kajian Tafsir Al - Misbah)." Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Soffi, Dewi Ariyanti. "Dialog Lintas Iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kehidupan Toleransi Umat Beragama." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 7, no. 2 (2023): 176–92.

- Taufiq, Firmanda, and Ayu Maulida Alkholid. "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 134–47. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.
- Triyono, Agus, and Ahmad Joko Setyawan. "ACEH DAN KONFLIK AGAMA: KONSTRUKSI PADA HARIAN REPUBLIKA." *Jurnal Studi Islam* 03 (2021): 141–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14773>.
- Ulfa, Maulida. "Maintaining Religious Moderation in the Digital Age: Challenges and Strategies for Facing Technology." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3, no. 1 (2024): 43–63. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>.
- Ulva, Ais Mariya, Dhiya Ul Hikmah, Diva Istivarini, and Hasmy Nasanjy El M. "Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 459–74.